



**PENGARUH INOVASI PERPAJAKAN DAN SIKAP
SKEPTIS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM RESTORAN
DI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Pancabudi

Oleh:

NANDA PUTRA ZULKARNAEN
1715100136

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH INOVASI PERPAJAKAN DAN SIKAP SKEPTIS TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM RESTORAN DI KOTA BINJAI

NAMA : NANDA PUTRA ZULKARNAEN
N.P.M : 1715100136
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Irawan, SE., M.Si



Nur Aliah, S.E., M.Si.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nanda Putra Zulkarnaen
NPM : 1715100136
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
JudulSkripsi : PENGARUH INOVASI PERPAJAKAN
DAN SIKAP SKEPTIS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
RESTORAN DI KOTA BINJAI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima kosekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian haridiketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024


Nanda Putra Zulkarnaen
1715100136

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : NANDA PUTRA ZULKARNAEN
NPM : 1715100136
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU
JUDUL : PENGARUH INOVASI PERPAJAKAN DAN SIKAP
SKEPTIS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM RESTORAN DI KOTA BINJAI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya. .

Medan, Mei 2024
Penulis



Nanda Putra Zulkarnaen
1715100136

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh inovasi perpajakan dan sikap skeptis terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel inovasi perpajakan dan sikap skeptis sebagai variabel bebas. Sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Sample dalam penelitian ini berjumlah 100 yang merupakan pelaku UMKM restoran di kota Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data skunder dan primer yang dikumpulkan lalu dilakukan olah data dengan menggunakan SPSS versi 16. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa inovasi perpajakan dan sikap skeptis berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai.

Kata Kunci : Inovasi Perpajakan, Sikap Skeptis, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

ABSTRACT

This study aims to see how the influence of tax innovation and skepticism on MSME taxpayer compliance in restaurants in the city of Binjai. The variables used in this research are tax innovation variables and skepticism as independent variables. Meanwhile, mandatory compliance is the dependent variable. The sample in this study amounted to 100 who were the perpetrators of MSME restaurants in the city of Binjai. This research was conducted with a quantitative approach by processing secondary and primary data collected and then processing the data using SPSS version 16. The results obtained from this study stated that tax innovation and skepticism had a positive and significant effect both partially and simultaneously on MSME taxpayer compliance. restaurant in Binjai city.

Keywords: Taxation Innovation, Skepticism, Taxpayer Compliance, UMKM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Pengaruh Inovasi Perpajakan Dan Sikap Skeptis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala dan kekurangan. Alhamdulillah kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E. M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Irawan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Nur Aliah, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing II (Dua) yang telah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
6. Kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta yang dimana telah menghantarkan penulis sampai pada titik ini atas doa-doanya.
7. Kepada adik Saya Dinda Dan Nabila Yang Selama ini Ngesupport Saya
8. Kepada teman-teman saya Fadhlán, Ricco, Abrar, Nata, Luna, Dan Dafanny Yang Telah Turut membantu

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian lebih lanjut. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini

nantinya dapat berguna bagi penulis, para pembaca sekalian dan bagi pihak-pihak yangmembutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Medan, Mei 2024

(Nanda Putra Zulkarnen)

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah dan Perumusan Masalah.....	7
1.3.1 Batasan Masalah.....	7
1.3.2 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Theory of planned behavior.....	11
2.1.2 Konsep Pajak.....	12
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.4 Inovasi Pajak.....	17
2.1.5 Sikap Skeptis.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka Konseptual.....	21
2.4 Hipotesis.....	22
BAB III : METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
2.1.1 Tempat Penelitian.....	24
2.1.2 Waktu Penelitian.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Teknik Analisa Data.....	26
3.6.1 Regresi Linier Berganda.....	26
3.6.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	27
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	28
3.6.3 Uji Kesesuaian (<i>Test Goodnes Of Fit</i>).....	31
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Deskripsi Data Responden.....	33
4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	35

4.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	37
4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	39
4.1.5 Uji Kesesuaian (<i>Test Goodnes Of Fit</i>).....	41
4.2 Pembahasan	45
4.2.1 Pengaruh Inovasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai	45
4.2.2 Pengaruh Sikap Skeptis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai	46
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data UMKM Terdaftar Di Kota Binjai Tahun 2021	2
Tabel 1.2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Kota Binjai Tahun 2021	4
Tabel 1.2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Kota Binjai Tahun 2021	5
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 SkedulProses penelitian	24
Tabel 3.2 Mapping Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	34
Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	35
Tabel 4.5 Coefficients	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Inovasi Perpajakan.....	37
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Skeptis Wajib Pajak	38
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	38
Tabel 4.9 Kolmogorov Smirnov.....	39
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik (Uji t)	42
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji f)	43
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot.....	41

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of planned behavior*

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen's mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Dalam hal ini, upaya untuk menggunakan TPB sebagai pendekatan untuk menjelaskan *whistleblowing* dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya, dan menyediakan sarana untuk memahami kesenjangan luas diamati antara sikap dan perilaku (Park dan Blenkinsopp 2009). Ajzen dan Fishben (1988) menyempurnakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan memberikan nama TPB.

TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subyektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh (Sulistomo dan Prastiwi 2011). *Theory of Planned Behavior* (TPB) tampaknya sangat cocok untuk menjelaskan niat pengungkapan kecurangan

(*whistleblowing*), dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan didasarkan pada proses psikologis yang sangat kompleks. Unsur dari teori ini terdiri dari tiga bagian yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), pengaruh sosial yaitu norma subyektif (*subjective norms*) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dasar kepercayaan terhadap perilaku.

2.1.2 Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007 menjelaskan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus Siti Resmi (2014:2), yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Diana Sari (2013:37) ada 2 (dua), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian - pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah.

3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu:

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- c. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- d. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- e. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- f. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *sistem Self Assessment*.

Di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material.

2. Faktor- faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Susilawati (2019), menyatakan bahwa Faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah:

a. Kesadaran wajib pajak

rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

b. Efektifitas system perpajakan

Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Apabila persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan itu positif maka akan memengaruhi Wajib Pajak dalam kesadaran membayar pajak.

c. Pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

d. Transparansi

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang

diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Ini adalah situasi dimana apa yang sedang disampaikan ditinjau dan dievaluasi.

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

- a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.1.4 Inovasi Pajak

1. Pengertian Inovasi Pajak

Meirna Dianingtyas (2017), menyatakan bahwa inovasi pajak adalah perbaikan proses bisnis interaksi antara wajib pajak dan institusi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang bertujuan untuk membangun institusi perpajakan yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas pengumpulan penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada institusi perpajakan.

2. Indikator Inovasi Pajak

Gusti Ngurah Surya Jelantik (2021), menyatakan bahwa beberapa indikator dari inovasi pajak antara lain adalah : survey secara berkala, peningkatan pelayanan pajak, pelatihan SDM, pembaharuan akses informasi pajak, pembaharuan akses pembayaran pajak.

2.1.5 Sikap Skeptis

1. Pengertian Sikap Skeptis

Pemikiran skeptis sudah ada sejak zaman pro-socrates yaitu zaman Yunani kuno. Hal tersebut dapat dilihat dari ajaran filsafat Xenophanes yang menyatakan bahwa ia meragukan kemampuan indra manusia. Apa yang dilihat dari indra manusia adalah ilusi belaka dan bukan merupakan kebenaran. Pelopor dari konsep skeptisisme di Yunani kuno adalah Pyrrho. Kemudian pada abad pertengahan, Agustinus mencetuskan bahwa aliran skeptisisme yang dianut Yunani kuno yang meragukan kebenaran adalah salah. Menurut KBBI, skeptis adalah sifat kurang percaya dan ragu-ragu (terhadap keberhasilan, suatu ajaran dan sebagainya).

2. Indikator Sikap Skeptis

Menurut kamus Merriam Webster yang menjadi indikator dari sikap skeptisisme adalah *questioning mind, suspension of judgement, dan search for knowledge*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil yang didapat pada beberapa penelitian terdahulu ada perbedaan aspek yang dipertimbangkan dalam memilih profesi akuntan bisnis. Sebagai bahan perbandingan dan acuan guna menghindari adanya persepsi kesamaan penelitian ini dengan seluruh penelitian sebelumnya, berikut adalah penyajian tabel mapping penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aji Setia Wiguna (2018)	Inovasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia	UMKM	Sistem Pemungutan Pajak	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak meningkat. Secara keseluruhan, pertumbuhan kepatuhan Wajib Pajak mengalami perubahan signifikan yaitu dari sebesar 5,43% menjadi 6,02%. Sedangkan untuk kontribusi terhadap penerimaan pajak juga meningkat sebesar $\pm 2,75\%$ yaitu dari sebesar 6,69% menjadi 9,44%.
2	Agung Setia Nugraha (2021)	Pengaruh regulasi perpajakan terhadap kinerja keuangan dengan di moderasi oleh inovasi strategi dalam kinerja perusahaan sektor produksi manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019	regulasi perpajakan, kinerja keuangan, inovasi strategi.	Perusahaan Manufaktur	analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi	Berdasarkan hasil uji moderated regression analysis (MRA) variabel inovasi strategi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan variabel inovasi strategi mampu menjadi variabel yang memoderasi hubungan antara regulasi perpajakan terhadap kinerja keuangan.

3	Della Fadhlita (2018)	Pengaruh Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)	Sistem E-Filing, E-SPT, Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	kuantitatif dengan jenis penelitian Ex post facto	(1) terdapat pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05, (2) terdapat pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi juga kurang dari 0.05, (3) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05, dan (4) hasil uji F untuk melihat pengaruh ketiga variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependensi dengan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dengan besaran pengaruh sebesar 64.7%.
4	Wulan dari Agustini (2019)	Pengaruh Penerapan E-FILING, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KKP Pratama Yogyakarta	Kepatuhan Wajib Pajak, E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	(1) Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. (3) Kesadaran wajib pajak

						berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,621. (4) Penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $59.820 > 3,94$.
5	Sri Haryanti (2019)	Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Surakarta	Batik, pemasaran digital, online, disrupsi, jejaring sosial, kualitas	Kepatuhan Wajib Pajak	deskriptif kualitatif	PT Batik Danar Hadi Surakarta mempraktikkan digital strategi pemasaran (online marketing) melalui media sosial seperti facebook, instagram, dan jaringan internet lainnya yang terhubung dengan jangkauan konsumen yang lebih luas sejak tahun 2015

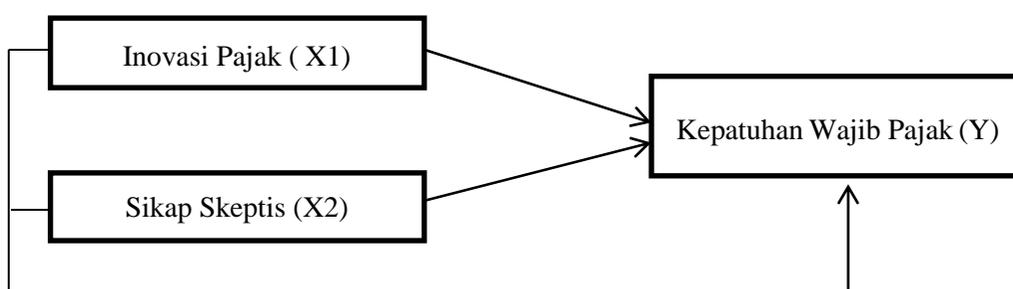
2.1 Kerangka Konseptual

Menurut Putri (2019) kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti dan dipecahkan. Kerangka konseptual berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau

boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Jadi dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah sintesis dari hubungan antar variabel yang telah disusun berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan dan kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk mendapatkan sintesis hubungan antar variabel penelitian. Sintesis hubungan variabel-variabel ini digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Marselina (2014) menyatakan bahwa kerangka konseptual diharapkan mampu memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel variabel 1 yang akan diteliti.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dilihat bahwa kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.2 Hipotesis

Dalam buku *Entrepreneurship Education Without Boundaries* menyatakan bahwa hipotesis (atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah

hipotesa) dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo yang berarti di bawah dan thesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya.

Dari pendapat tersebut diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1: Inovasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Sikap Skeptis secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Inovasi pajak dan Sikap Skeptis secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (ketrampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun dari pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor usaha mikro kecil dan menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan

sektor swasta difokuskan pada UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor informal merupakan salah satu laju kekuatan pendorong dan pembangunan perekonomian, fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, mereka juga cukup kreatif dalam meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jenis produksi dan memberi kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Berikut adalah data UMKM terdaftar di Kota Binjai tahun 2021.

Tabel 1.1 Data UMKM Terdaftar Di Kota Binjai Tahun 2021

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Usaha Dagang	28457
2	Makanan dan Minuman	13465
3	Restoran	18972
4	Perbengkelan	598

Sumber : binjaikota.bps.go.id

Strategi pemasaran yang efektif, salah satunya dapat dilihat dari stabilitas tingkat penjualan dari tahun ke tahun sesuai dengan kuantitas produk yang mampu diproduksi oleh perusahaan. UMKM juga menjadi salah satu usaha yang menambah pajak penghasilan Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara (Arifin, 2015). Dengan Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Tersedianya

penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan program yang dilakukan oleh setiap unit pemerintahan (departemen, kementerian, badan dan lembaga negara lainnya) setiap tahun.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan peraturan (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Bohari, 2010). Besarnya jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Sehingga pemungutan pajak harus dilakukan dengan optimal. Kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.

Akan tetapi, target penerimaan pajak Kota Binjai masih belum tercapai. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak yang rendah, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan pelayanan pajak juga masih rendah (Supriyati, 2011). Pada hakekatnya pemungutan pajak merupakan hal yang nyata untuk pengabdian masyarakat kepada negara, selain itu pajak juga menggambarkan kemandirian bangsa dan merupakan partisipasi aktif dari warga Negara yang bertanggung jawab, namun sebagai warga negara yang baik harus menyadari tentang pentingnya membayar pajak sesuai dengan aturan perundang –

undangan yang berlaku (Trisnawati dan Putri, 2014). Berikut adalah Data Kepatuhan Wajib Pajak Kota Binjai Tahun 2021

Tabel 1.2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Kota Binjai Tahun 2021

No	Wajib Pajak	Jumlah
1	WP terdaftar: Orang Pribadi Badan	71.557 73.914 76.509 4.209 4.840 5.231
2	Jumlah WP efektif Orang Pribadi Badan	69.296 64.691 64.691 2.085 2.741 2.741
3	SPT diterima Orang Pribadi Badan	24.753 24.753 24.639 1.093 1.096 705
4	SPT kurang bayar Orang Pribadi Badan	2.079 2.182 1.679 284 313 213
5	SPT Nihil Orang Pribadi Badan	22.674 24.205 22.960 809 783 488
6	Belum Menyampaikan SPT Orang Pribadi Badan	44.543 37.803 40.052 992 1.645 2.039
7	Rasio Tahunan PPh Orang Pribadi Badan	64,27 58,43 61,91 47,57 60,01 74,38

Sumber : binjaikota.bps.go.id

Mengingat pentingnya peran pajak terhadap penerimaan negara di Indonesia, menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan penanganan yang serius dalam pengelolaannya, maka usaha untuk meningkatkan

penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang juga merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, namun juga butuh peran aktif dari para wajib pajak itu. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Nugroho. dkk, 2016). Masyarakat harus sadar sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara maka kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sistem dan ketentuan pajak tersebut (Sugiono, 2016).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan adanya *research gap* yang berbanding terbalik dengan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Binjai. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai, dari sektor pajak Restoran dan Rumah Makan tahun ini merosot tajam. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai, Elfitra Hariadi mengaku sudah memberikan surat tagihan kepada seluruh pengelola tempat makan yang menunggak. Berikut adalah data jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Binjai Tahun 2021.

Tabel 1.3 jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Binjai

No	Jenis UMKM	Jumlah UMKM	Angka Kepatuhan	Dalam %
1	Usaha Dagang	28457	11951,94	42%
2	Makanan dan	13465	5655,3	29%

	Minuman			
3	Restoran	18972	7968,24	37%
4	Perbengkelan	598	251,16	18%

Sumber : binjaikota.bps.go.id

Tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Binjai dalam menyampaikan SPT tahunan masih sangat rendah, yaitu hanya 34 persen dari keseluruhan jumlah wajib pajak yang terdaftar efektif sebanyak 24.753 24.753 24.639. Sehingga hal ini jauh dibawah target nasional yang sebesar 62,5 persen. Inilah kondisi nyata kesadaran wajib pajak di wilayah Kota Binjai. Perlu kerja keras dari semua pihak yang berkaitan dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. (www.online-pajak.com, diakses 7 Desember 2021).

Hal tersebut didasari oleh adanya sikap skeptis dari para pemilik UMKM di Kota Binjai atas kewajiban pajak yang diharuskan kepada mereka. Sikap skeptis tersebut ditumbulkan akibat adanya beberapa kasus penyalahgunaan jabatan dalam pelaporan pendapatan daerah dari pembayaran wajib pajak Kota Binjai, dan alokasi pajak yang dianggap tidak memiliki transparansi. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi pemerintah Kota Binjai untuk menerapkan strategi pajak atau inovasi pajak yang baru terhadap para pelaku UMKM di Kota Binjai, yakni dengan menerapkan kebijakan *typing box*.

Typing box sendiri adalah alat perekam transaksi usaha secara online yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha/wajib pajak. Namun hingga saat ini masih tidak ada kejelasan mengenai penerapan *typing box* oleh para pelaku UMKM di Kota Binjai. Hal tersebut didasarkan atas sikap skeptis pelaku UMKM yang masih ada hingga saat ini . Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran latar belakang dan uraian masalah

diatas penulis menyusun skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Inovasi Perpajakan Dan Sikap Skeptis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan diatas, berikut adalah identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Adanya sikap skeptis yang mendasari penundaan pajak yang dilakukan oleh para pelaku UMKM restoran di Kota Binjai.
2. Terjadi penyalahgunaan jabatan dalam pelaporan pendapatan daerah dari pembayaran wajib pajak Kota Binjai, yang mendasari timbulnya sikap skeptis para pelaku UMKM restoran di Kota Binjai.
3. Tidak adanya transparansi mengenai alokasi pendapatan daerah dari pembayaran wajib pajak Kota Binjai, yang juga mendasari timbulnya sikap skeptis para pelaku UMKM restoran di Kota Binjai.
4. Adanya ketidakjelasan dan ketidakfahaman para pelaku UMKM mengenai implementasi inovasi wajib pajak yang diberikan kepada para pelaku UMKM restoran di Kota Binjai oleh pemerintahan Kota Binjai.

1.3 Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini dibatasi agar tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian. Dan peneliti membatasi penelitian ini hanya dengan mengambil objek penelitian yakni

UMKM restoran yang ada di Kota Binjai.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah yang diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah inovasi pajak secara parsial berpengaruh pada keputusan wajib pajak UMKM restoran di Kota Binjai?
2. Apakah sikap skeptis secara parsial berpengaruh kepada keputusan wajib pajak UMKM restoran di Kota Binjai?
3. Apakah inovasi pajak dan sikap skeptis secara simultan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di Kota Binjai?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh inovasi pajak terhadap keputusan wajib pajak UMKM restoran di Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui secara parsial sikap skeptis terhadap keputusan wajib pajak UMKM restoran di Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh secara bersamaan dari inovasi pajak dan sikap skeptis terhadap keputusan wajib pajak UMKM restoran di Kota Binjai

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan diharapkan nantinya penelitian ini dapat menambah kepustakaan.

2. Bagi pelaku UMKM restoran di Kota Binjai, diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat membantu memberikan kesadaran atas kewajiban pajak yang harus dilaksanakan.
3. Bagi pemerintahan Kota Binjai diharapkan agar nantinya dapat mengawasi dan memberikan dampingan terhadap para pelaku UMKM di Kota Binjai agar lebih memahami mengenai kewajiban pajak yang telah diharuskan kepada para pelaku UMKM.
4. Bagi pembaca diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Ayuni Kartika Putri Suardana dengan judul Menakar Skeptisisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Perspektif Wajib Pajak . Sedangkan penelitian ini berjudul Pengaruh Inovasi Perpajakan Dan Sikap Skeptis Terhadap Keputusan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai.

Adapun beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Jumlah Observasi/Sampel** : Sampel pada penelitian terdahulu adalah beberapa wajib pajak terkait yang berada di Kota Denpasar bali. Sedangkan sample dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM restoran yang ada di Kota Binjai.
2. **Variabel Penelitian** : Pada penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel bebas (sikap skeptisisme dan kewajiban pajak) serta satu variabel terikat yakni wajib pajak. Sedangkan yang berperan sebagai variabel bebas adalah

inovasi pajak dan sikap skeptis. Dan yang berperan sebagai variabel terikat adalah keputusan wajib pajak.

3. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan pada Januari 2021, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Oktober 2021.
4. **Lokasi penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Denpasar, Bali. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Binjai, Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif adalah metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2012:11) menyatakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan di bulan November Tahun 2021 sampai dengan selesai. Dengan format yang tertera sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses penelitian

No	Kegiatan	2021			2022							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Riset awal/Pengajuan judul	■	■									
2	Penyusunan Proposal			■								
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■					
4	Seminar Proposal						■	■				
5	Perbaikan Acc Proposal						■	■				
6	Pengolahan Data						■	■	■			
7	Penyusunan Skripsi							■	■			
8	Bimbingan Skripsi							■	■	■		
9	Seminar Hasil											
9	Sidang Meja Hijau											

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk mendukung variabel dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan data primer dan diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait atau berwenang. Penelitian ini juga menggunakan data primer yakni berupa kuisisioner yang diberikan kepada pemilik UMKM Restoran Kota Binjai.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015, h.38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.

Operasionalisasi variabel sangat diperlukan karena berguna untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Inovasi Pajak	Inovasi Pajak adalah pembaharuan terhadap pelaksanaan kepatuhan wajib pajak yang diciptakan guna memudahkan pelaksanaan ketertiban wajib pajak. <i>Sumber : (AS Kusumaningtyas, 2019)</i>	<i>Tipping Box</i> , Holine Pajak Daerah, DJP Online, E-commerce, Mbanking.	Likert
2	Sikap Skeptis	Skeptis adalah kurang percaya atau ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya). Skeptis berasal dari kata skeptisisme, yaitu aliran atau paham yang memandang segala sesuatu tidak pasti atau meragukan dan mencurigakan. <i>Sumber : (Levardy, 2016)</i>	Pola Pikir. Pengetahuan, Tingkat kepercayaan, Issue, transparasi.	Likert
3	Kepatuhan Wajib Pajak	Suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. <i>Sumber : (jurnal.bppk.kemenkeu.go.id, 2019)</i>	Membayar. Memotong, dan Melaporkan pajak, Kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak.	Likert

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data berupa UMKM restoran yang dijadikan sebagai populasi, dan menggunakan teknik sample jenuh untuk memilih seluruh populasi yang ada sebagai sampel. Kemudian melakukan penyebaran angket atau kuisioner kepada pemilik UMKM Daftar populasi dan sampel dapat dilihat pada halaman lampiran.

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan olah data menggunakan aplikasi SPSS Versi 16.

Metode dan teknik analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian secara serempak dengan menggunakan F hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau melihat signifikansi pada output SPSS. Dalam beberapa kasus dapat terjadi bahwa secara simultan (serempak) beberapa variabel mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi secara parsial tidak.

Asumsi klasik yang sering digunakan adalah asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan asumsi linearitas. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dengan pengaruh variabel bebas yang jumlahnya 3 (tiga) atau lebih (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel terikat (Y).

Dengan rumus:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n.$$

Keterangan:

Y = variabel terikat

a = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi

X_1, X_2 = variabel bebas

3.6.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan keadaan yang menggambarkan apakah instrumen yang yang kita gunakan mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Hasil yang diperoleh dari uji validitas adalah suatu instrumen yang valid atau sah. Tingkat validitas yang tinggi adalah yang terbaik. Sebaliknya suatu instrumen yang memiliki validitas rendah merupakan instrumen yang kurang baik atau tidak direkomendasikan bahkan sebaiknya dikeluarkan dari kelompok indikator.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama.

Reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ialah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS).

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik. Sedangkan menurut Saeful dan Bahruddin (2014:113), uji normalitas adalah uji untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data yang nantinya akan berkaitan dengan pemilihan uji statistik. Sehingga untuk mengetahui uji normalitas adalah kamu bisa menggunakan beberapa cara, diantaranya p-plot, kolmogorov, lilliefors, dan chi square.

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik *Kolmogorov-smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp.sig (2-tailed)* > 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu: 1) dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi, 2) dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2), dan 3) dengan melihat nilai *eigenvalue* dan *condition index*.

Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi dan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2). Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,100, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidak samaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Salah satu metode pengujiannya adalah dengan uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Kesesuaian (*Test Goodnes Of Fit*)

a. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2012: 98) uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.
Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima.
Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini nilai T_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai T_{tabel} dengan kriteria pengambilan keputusan adalah:

Ho ditolak jika $T_{hitung} < T_{tabel} \alpha = 5\%$ Ha diterima jika $T_{hitung} > T_{tabel} \alpha = 5\%$

b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis *alternatife*, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai Fhasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Rusiadi (2017) mengatakan koefisien determinan (R^2) bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pada tahun 2022 ini perkembangan ekonomi di Kota Binjai bisa dikatakan dalam kondisi membaik pasca dampak covid-19. Salah satu kegiatan ekonomi yang turut berperan dalam peningkatan perekonomian di Kota Binjai adalah UMKM yang ada di Kota tersebut. Pertumbuhan tersebut salah satunya dikarenakan bermunculan UMKM Restoran baru yang didirikan oleh masyarakat Kota Binjai. Peralihan kegiatan ekonomi dari profesi karyawan menjadi pelaku wirausaha merupakan pilihan yang banyak diminati oleh masyarakat Kota Binjai.

Meningkatnya UMKM Restoran di Kota Binjai seharusnya juga berdampak pada meningkatnya pajak penghasilan di Kota tersebut. Namun dalam hal ini tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM Restoran di Kota Binjai masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada pelaku UMKM Restoran yang ada di Kota Binjai.

Kuisisioner yang disebarakan berjumlah 100 buah kuisisioner. Seluruh Kuisisioner yang disebarakan dapat diolah kembali karena seluruh butir pertanyaan masing-masing diisi oleh setiap responden. Gambaran mengenai data sampel ini dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	100	100%
2.	Kuesioner yang kembali	100	100%
3.	Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2022

4.1.2 Deskripsi Data Responden

Analisis karakteristik responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau identitas responden yang meliputi: jenis kelamin, usia. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan:

a. Jenis Kelamin

Berikut ini adalah tabel hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	67	67.0	67.0	67.0
Perempuan	33	33.0	33.0	33.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa 67 orang atau 67% respondendi dominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 33 orang atau 33% responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

b. Usia

Berikut ini adalah tabel hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia.

Tabel 4.3
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dibawah 30 tahun	55	55	55	48.8
30-40 tahun	25	25	25	25
Diatas 40 tahun	20	20	20	20
Total	80	100.0	100.0	100.0

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sekitar 55 orang atau 55% responden yang berusia kurang dari 30 tahun, responden yang berusia 30 -40 tahun sebanyak 25 orang atau 25%, dan responden yang berusia diatas 40 tahun sebanyak 20 orang atau 20%.

c. Lama Usaha

Berikut ini adalah table hasil uji deskripsi responden berdasarkan lama usahannya.

Tabel 4.4
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 3 tahun	30	30	30	30
3-10 tahun	45	45	45	45
.> 10 tahun	25	25	25	25
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang telah mendirikan usahanya kurang dari 3 tahun berjumlah 30 orang atau sebesar 30%.

Sedangkan bagi responden yang telah menjadi pelaku UMKM selama 3-10 tahun berjumlah 45 orang atau 45%, jumlah ini merupakan jumlah responden terbanyak dalam kategori lama menjadi pelaku UMKM jika dibandingkan dengan jumlah responden pada kategori yang sama. Sedangkan responden yang telah menjadi pelaku UMKM selama lebih dari 10 tahun berjumlah 25 orang atau 25%.

4.1.3 Deskripsi Jawaban Responden

Berdasarkan output yang didapat dari hasil kuisisioner yang disebarakan kepada para responden, menyatakan bahwa Inovasi Perpajakan (Variabel X1) sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Restoran di Kota Binjai. Hal tersebut sejalan dengan jawaban para pelaku UMKM pada kuisisioner yang disebarakan. Dimana hampir seluruh responden menjawab item pertanyaan mengenai inovasi perpajakan dengan pilihan sangat setuju.

Peneliti juga sudah melakukan wawancara terhadap para responden yang diminta untuk mengisi kuisisioner. Salah satunya adalah pelaku UMKM Moro Tresno Binjai. Pemilik UMKM mengatakan bahwa selama ini pelaporan pajak sangat dimudahkan dengan adanya pelayanan online seperti DJP online, Hotline pajak, serta pembayaran yang bisa dilakukan dengan menggunakan *ecommerce*, Mbaking, Digital Wallet. Hal tersebut tentunya dapaaat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan pajak para wajib pajak.

Sama halnya dengan inovasi perpajakan, Sikap Skeptis (X2) juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Restoran di Kota Binjai. Yang dibuktikan dengan adanya jawaban dari kuisisioner yang disebarakan kepada para responden. Sejalan dengan jawaban beberapa responden dalam wawancara, yang menyatakan bahwa transparansi perpajakan merupakan hal yang mutlak yang

harus dijalankan baik oleh wajib pajak, lembaga perpajakan maupun pemerintah. Dengan adanya transparansi yang baik, maka dampak baik atas implementasi dari retribusi perpajakan akan merata dirasakan oleh masyarakat.

Pada tabel tabulasi data yang disajikan oleh peneliti dibawah ini, dapat dilihat bahwa pada setiap butir pertanyaan yang diajukan untuk variabel X1 dan X2 masing-masing mendapat skor yang tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut dapat dilihat daritabel berikut:

Tabel 4.5
X1.1 Anda mengetahui adanya inovasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaporan pajak para wajib pajak di Indonesia

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	98	98	98	98
Setuju	1	1	1	1
Netral	1	1	1	1
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa 98% menyatakan sangat setuju, 1% responden setuju dan 1% menyatakan netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka mengetahui adanya inovasi pajak yang diterapkan oleh pemerintah.

Tabel 4.6
X1.2 Sistem pembayaran pajak di daerah anda semakin efektif karena sudah menerapkan kebaruan terhadap inovasi perpajakan.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	94	94	94	94
Setuju	6	6	6	6
Netral				
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.6 tersebut dapat dilihat bahwa 94% menyatakan sangat setuju dan 6% responden setuju. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa sistem pembayaran pajak di daerah kota binjai sudah semakin efektif dengan adanya inovasi pajak.

Tabel 4.7
X1.3 Setujukah anda bahwa *typing box* merupakan salah satu pembaharuan inovasi pajak yang memudahkan anda dalam mengefisiensi pelaporan pajak sebagai salah satu wajib pajak.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	77	77	77	77
Setuju	21	21	21	21
Netral	2	2	2	2
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.7 tersebut dapat dilihat bahwa 77% menyatakan sangat setuju dan 21% responden setuju dan 2% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa bahwa *typing box* merupakan salah satu pembaharuan inovasi pajak yang memudahkan dalam mengefisiensi pelaporan pajak sebagai salah satu wajib pajak.

Tabel 4.8
X1.4 Apakah Inovasi Perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah anda rasakan manfaatnya

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	77	77	77	77
Setuju	20	20	20	20
Netral	3	3	3	3
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.8 tersebut dapat dilihat bahwa 77% menyatakan sangat setuju dan 20% responden setuju dan 3% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka setuju bahwa mereka sudah merasakan dampak dari inovasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Tabel 4.9
X1.5 Setujukah anda bahwa pelaporan pajak dapat dilakukan dimana saja dengan memanfaatkan digital teknologi.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	66	66	66	66
Setuju	19	19	19	19
Netral	15	15	15	15
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.9 tersebut dapat dilihat bahwa 66% menyatakan sangat setuju dan 19% responden setuju dan 15% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka setuju jika pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja.

Tabel 4.10
X1.6 Setujukah anda jika pemerintah harus terus melakukan pembaharuan perpajakan dalam system pelaporannya agar terpenuhinya prinsip transparansi seperti yang seharusnya.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	88	88	88	88
Setuju	11	11	11	11
Netral	1	1	1	1
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.10 tersebut dapat dilihat bahwa 88% menyatakan sangat setuju dan 11% responden setuju dan 1% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka setuju jika pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja. pemerintah harus terus melakukan pembaharuan perpajakan dalam system pelaporannya agar terpenuhinya prinsip transparansi seperti yang seharusnya.

Tabel 4.11
X1.7 Anda mempercayai sepenuhnya proses pembayaran pajak dengan digital teknologi tanpa ada kendala.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	77	77	77	77
Setuju	21	21	21	21
Netral	2	2	2	2
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa 77% menyatakan sangat setuju dan 21% responden setuju dan 2% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka mempercayai sepenuhnya proses pembayaran pajak dengan digital

teknologi tanpa ada kendala.

Tabel 4.12

X1.8 Penyampaian aduan mengenai masalah perpajakan dapat dilakukan secara online.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	69	69	69	69
Setuju	25	25	25	25
Netral	6	6	6	6
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.12 tersebut dapat dilihat bahwa 69% menyatakan sangat setuju dan 25% responden setuju dan 6% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa penyampaian aduan mengenai masalah perpajakan dapat dilakukan secara online.

Tabel 4.13

X1.9 Aduan mengenai masalah perpajakan anda diatasi dengan cepat tanggap meskipun hanya melalui pengaduan online.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	55	55	55	55
Setuju	45	45	45	45
Netral				
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.13 tersebut dapat dilihat bahwa 55% menyatakan sangat setuju dan 45% responden setuju. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa aduan mengenai masalah perpajakan diatasi dengan cepat tanggap meskipun hanya melalui pengaduan online.

Tabel 4.14

X1.10 Anda merasa lebih mudah dan lebih faham jika pelaporan pajak dilakukan secara tersistem berbasis digital teknologi dibandingkan secara langsung.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	84	84	84	84
Setuju	12	12	12	12
Netral	4	4	4	4
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.14 tersebut dapat dilihat bahwa 84% menyatakan sangat setuju, 12 % responden setuju dan 4 responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa lebih mudah dan lebih faham jika pelaporan pajak dilakukan secara tersistem berbasis digital teknologi dibandingkan secara langsung.

Tabel 4.15

X2.1 Saya yakin bahwa tata kelola pajak di Indonesia sudah sejalan dengan Undang-Undang perpajakan.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	98	98	98	98
Setuju	2	2	2	2
Netral				
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.15 tersebut dapat dilihat bahwa 98% menyatakan sangat setuju dan 2 % responden menjawab setuju Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa tata kelola pajak di Indonesia sudah sejalan dengan Undang-Undang perpajakan.

Tabel 4.16
X2.2 Saya yakin bahwa penyaluran pendapatan retribusi pajak sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan sesuai prosedur yang seharusnya.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	86	86	86	86
Setuju	14	14	14	14
Netral				
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.16 tersebut dapat dilihat bahwa 86% menyatakan sangat setuju dan 14 % responden menjawab setuju. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa penyaluran pendapatan retribusi pajak sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan sesuai prosedur yang seharusnya.

Tabel 4.17
X2.3 Saya ikut merasakan dampak besar dari implementasi atas retribusi pajak di daerah saya.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	61	61	61	61
Setuju	23	23	23	23
Netral	16	16	16	16
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.17 tersebut dapat dilihat bahwa 61% menyatakan sangat setuju, 23 % responden menjawab setuju dan 16 responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka ikut merasakan dampak besar dari implementasi atas retribusi pajak di daerah saya.

Tabel 4.18

X2.4 Saya yakin bahwa pemerintah sudah tepat sasaran dalam menentukan besaran pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan kepada wajib pajak.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	77	77	77	77
Setuju	20	20	20	20
Netral	3	3	3	3
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.18 tersebut dapat dilihat bahwa 77% menyatakan sangat setuju, 20 % responden menjawab setuju dan 3% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah sudah tepat sasaran dalam menentukan besaran pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan kepada wajib pajak.

Tabel 4.19

X2.5 Saya yakin bahwa seluruh masyarakat ikut merasakan dampak baik dari penyaluran pajak di setiap daerahnya secara merata.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	48	48	48	48
Setuju	33	33	33	33
Netral	19	19	19	19
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.19 tersebut dapat dilihat bahwa 48% menyatakan sangat setuju, 33 % responden menjawab setuju dan 19% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh masyarakat ikut merasakan dampak baik dari penyaluran pajak di setiap daerahnya secara merata.

Tabel 4.20
X2.6 Saya yakin bahwa Undang-Undang perpajakan merupakan ketetapan yang subjektif.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	63	63	63	63
Setuju	31	31	31	31
Netral	6	6	6	6
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.20 tersebut dapat dilihat bahwa 63% menyatakan sangat setuju, 31 % responden menjawab setuju dan 6% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa responden setuju Undang-Undang perpajakan merupakan ketetapan yang subjektif.

Tabel 4.21
X2.7 Pajak merupakan bentuk wajib pengabdian masyarakat masyarakat kepada negara.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	79	79	79	79
Setuju	21	21	21	21
Netral				
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.21 tersebut dapat dilihat bahwa 79% menyatakan sangat setuju, dan 21 % responden menjawab setuju. Maka dapat dinyatakan bahwa responden setuju Pajak merupakan bentuk wajib pengabdian masyarakat masyarakat kepada negara.

Tabel 4.22

X2.8 Kewajiban pajak merupakan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang dan bersifat mengikat.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	62	62	62	62
Setuju	33	33	33	33
Netral	5	5	5	5
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.22 tersebut dapat dilihat bahwa 62% menyatakan sangat setuju, 33% responden menjawab setuju dan 5% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa responden setuju Pajak merupakan Kewajiban pajak merupakan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang dan bersifat mengikat.

Tabel 4.23

X2.9 Salah satu sumber dana pembangunan negara yang baik berasal dari pendapatan pajak.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	55	55	55	55
Setuju	45	45	45	45
Netral				
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.23 tersebut dapat dilihat bahwa 55% menyatakan sangat setuju dan 45% responden menjawab setuju. Maka dapat dinyatakan bahwa responden setuju dengan pernyataan bahwa satu sumber dana pembangunan negara yang baik berasal dari pendapatan pajak.

Tabel 4.24

X2.9 Salah satu sumber dana pembangunan negara yang baik berasal dari pendapatan pajak.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	54	54	54	54
Setuju	46	46	46	46
Netral				
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.24 tersebut dapat dilihat bahwa 54% menyatakan sangat setuju dan 46% responden menjawab setuju. Maka dapat dinyatakan bahwa Salah satu sumber dana pembangunan negara yang baik berasal dari pendapatan pajak.

Tabel 4.25

Y.1 Wajib pajak menyiapkan dokumen untuk membayar pajak.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	95	95	95	95
Setuju	3	3	3	3
Netral	2	2	2	2
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.25 tersebut dapat dilihat bahwa 95% menyatakan sangat setuju, 3% responden menjawab setuju dan 2% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak harus menyiapkan dokumen untuk membayar pajak.

Tabel 4.26
Y.1 Wajib pajak menyiapkan dokumen untuk membayar pajak.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	95	95	95	95
Setuju	3	3	3	3
Netral	2	2	2	2
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.26 tersebut dapat dilihat bahwa 95% menyatakan sangat setuju, 3% responden menjawab setuju dan 2% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak harus menyiapkan dokumen untuk membayar pajak.

Tabel 4.27
Y.2 Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	92	92	92	92
Setuju	7	7	7	7
Netral	1	1	1	1
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.27 tersebut dapat dilihat bahwa 92% menyatakan sangat setuju, 7% responden menjawab setuju dan 1% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak selama ini berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak.

Tabel 4.28
Y.3 Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	76	76	76	76
Setuju	22	22	22	22
Netral	2	2	2	2
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.28 tersebut dapat dilihat bahwa 76% menyatakan sangat setuju, 22% responden menjawab setuju dan 2% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak selama ini selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.

Tabel 4.29
Y.4 Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	62	62	62	62
Setuju	36	36	36	36
Netral	2	2	2	2
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.29 tersebut dapat dilihat bahwa 62% menyatakan sangat setuju, 36% responden menjawab setuju dan 2% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak selama ini selalu menghitung pajak selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 4.30

Y.5 Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	77	77	77	77
Setuju	20	20	20	20
Netral	3	3	3	3
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.30 tersebut dapat dilihat bahwa 77% menyatakan sangat setuju, 20% responden menjawab setuju dan 3% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.

Tabel 4.31

Y.6 Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

	Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	66	66	66	66
Setuju	19	19	19	19
Netral	15	15	15	15
Tidak Setuju				
Sangat Tidak Setuju				
Total	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.31 tersebut dapat dilihat bahwa 66% menyatakan sangat setuju, 19% responden menjawab setuju dan 15% responden menjawab netral. Maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui adanya

perubahan nilai variabel dependen akibat perubahan dari nilai variabel independen.

Adapun rumus pengujiannya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

4.1.4 Uji Validitas Dan Reliabilitas

a. Hasil Uji Validitas

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji validitas dari empat variabel dengan 80 sampel responden. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi item-item total yakni dengan mengkorelasikan skor-skor suatu item kuesioner dengan totalnya. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05, dengan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$, $dk = 80 - 2 = 78$. Maka r_{tabel} adalah 0,278. Tabel dibawah ini adalah hasil uji validitas sosialisasi pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak pengusaha UMKM.

Tabel 4.32
Hasil Uji Validitas Variabel Inovasi Perpajakan

Butir Pertanyaan	R hitung	R tabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
Sikap Skeptis	0,569	0,278	0	Valid
Inovasi Pajak	0,504	0,278	0	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,572	0,278	0	Valid

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Tabel 4.6 menunjukkan variabel inovasi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua pertanyaan dengan memiliki nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) > r_{tabel} yaitu sebesar 0,278 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini menandakan bahwa variabel X1 pada penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

Variabel sikap skeptis wajib pajak memiliki nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) > r_{tabel} yaitu sebesar 0,278 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil

dari 0,05. Ini menandakan bahwa variabel X2 pada penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

Dan Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) > r_{tabel} yaitu sebesar 0,278 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini menandakan bahwa variabel X2 pada penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas variabel wajib pajak pengusaha UMKM.

Tabel 4.33
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Inovasi Perpajakan	0,768	Reliabel
Sikap Skeptis	0,676	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,667	Reliabel

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas Inovasi Perpajakan, Sikap Skeptis dan Kepatuhan Wajib Pajak masing-masing menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban- jawaban responden dari setiap variabel dinyatakan reliabel, sehingga kuesioner dari setiap variabel dapat dikatakan konsisten dari *instrument* penelitian dan dapat digunakan untuk penelitian.

4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitass

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hasil uji normalitas.

Tabel 4.34 Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08262293
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.041
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		.715
Asymp. Sig. (2-tailed)		.687

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Data adalah normal, jika nilai KolmogorovSmirnov adalah tidak signifikan (*Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05. Pada tabel 4.8 tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05. Yang dapat ditunjukkan nilai signifikan (*Asymp. Sig (2- tailed)* 0,687 > 0,05, hal ini menunjukkan data residual berdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi yang bebas dari problem multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,10, maka data tersebut dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah tabel hasil dari uji multikolinearitas.

Tabel 4.35
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Inovasi Perpajakan	0.258	3.871
Sikap Skeptis	0.339	2.951

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 yang ditunjukkan nilai *tolerance* 0,258, 0,339. Sedangkan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10 yang ditunjukkan nilai VIF sebesar 3,871, 2,951. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak memiliki masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.4.1.5 Uji Kesesuaian (*Test Of Goodnes Of Fit*)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*), yaitu:

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (X) secara parsial mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 4.36
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.617	2.710		9.083	.000
Inovasi Perpajakan	.407	.122	.506	3.277	.002
Sikap Skeptis	.653	.146	.602	4.467	.000

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Kriteria uji penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai Sig. $< 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t ini menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05 dengan dua arah dan $dk = n - 2$, $dk = 80 - 2 = 78$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,991. Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1) **Pengaruh Inovasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai.**

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa inovasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM restoran di kota Binjai, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2) Pengaruh Sikap Skeptis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai.

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sikap skeptis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima.

b. Uji Simultan (uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Y).

Adapun data hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.37
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	398.902	4	99.725	21.828	.000 ^a
Residual	342.648	75	4.569		
Total	741.550	79			

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Kriteria uji penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan nilai $Sig. > 0,05$ maka H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai $Sig. < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria uji F dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan nilai F untuk F_{tabel} $dk = n - k - 1$, $dk 80 - 4 - 1 = 75$ adalah sebesar 2,50 kemudian nilai signifikannya sebesar 0,000.

Berdasarkan tabel 4.12 hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah H_0 ditolak karena $F_{hitung} 21,828 > F_{tabel} 2,50$ dan mempunyai angka signifikan $0,000 < 0,50$. Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi perpajakan dan sikap skeptis secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (X) menjelaskan variabel dependen (Y). Berikut tabel hasil output pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4.38
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Standard Error of the Estimate
1	.733 ^a	.538	.513	2.137

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau *R square* adalah sebesar 0.538 atau senilai 53,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Inovasi Perpajakan dan Sikap Skeptis) mempengaruhi variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai) sebesar 53,8%. Sedangkan sisanya 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.39
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.617	2.710		9.083	.000
Inovasi Perpajakan	0.653	0.146	0.602	4.467	0.000
Sikap Skeptis	0.385	0.127	0.425	-3.167	0.002

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Dari hasil tersebut maka dapat diketahui model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 24,671 + 0,653 + (-0,385)$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut:

2. Nilai konstanta sebesar 24,671 menunjukkan apabila inovasi perpajakan dan sikap skeptis bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran di kota Binjai sebesar 24,671 atau dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran di kota Binjai tetap bernilai 24,671 apabila tidak dipengaruhi oleh Inovasi Perpajakan dan Sikap Skeptis.
3. Koefisien regresi Inovasi Perpajakan (X_1) sebesar 0,401 menjelaskan bahwa setiap peningkatan Inovasi Perpajakan sebesar 1 satuan, maka akan diikuti kenaikan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran di kota Binjai sebesar 0,401 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan.
4. Koefisien regresi Sikap Skeptis (X_2) sebesar 0,653 menjelaskan bahwa setiap

peningkatan sikap skeptis sebesar 1 satuan, maka akan diikuti kenaikan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran di kota Binjai sebesar 0,653 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa:

4.2.1 Pengaruh Inovasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan antara Inovasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 3,277 > t_{tabel} 1,991$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Artinya adanya pengaruh positif dan signifikan pada inovasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sumatriani, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Kesadaran Wajib Pajak Pada Pengaruh Sosialisai Dan Inovasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Survei Pada UMKM Kota Makassar”. Hasil penelitian Sumatriani menyatakan bahwa inovasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Inovasi-inovasi yang dilakukan pihak pajak dalam hal pembayaran, pelaporan, dan pembuatan faktur pajak secara online akan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan dengan kemauan sendiri untuk mendaptarkan NPWP dan memperoleh NPWP. Wajib pajak dapat melakukan penghitungan kewajiban pajak penghasilannya dengan benar. Wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak baik pokok

pajaknya maupun jika terjadi kekurangan pajak. Wajib pajak termotivasi untuk melaporkan SPT.

Terdapat pengaruh positif signifikan ini menunjukkan bahwa apabila variabel inovasi perpajakan mengalami kenaikan atau dengan sering dilakukannya inovasi perpajakan maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil tersebut diperkuat dengan adanya kaitan *Theory of Planned Behaviour* yang menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi niat atau kepatuhan individu dalam berperilaku yakni ketika suatu hal dapat memberikan hasil evaluasi positif ataupun negatif yang menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan ketika melakukan tindakan.

Adanya inovasi perpajakan yang dilakukan merupakan bentuk positif yang terus diupayakan dengan tujuan dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan wajib pajaknya. Sehingga timbul partisipasi yang positif pula dari wajib pajak UMKM restoran kota Binjai atas kepatuhan wajib pajak yang harus dijalankan.

4.2.2 Pengaruh Sikap Skeptis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran Di Kota Binjai.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan Sikap Skeptis (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai (Y), menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 4,467 < t_{tabel} 1,991$ dan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$, artinya adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel sikap skeptis terhadap wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai.

Sejalan dengan penelitian dari (Wanarta & Mangoting, 2014) dimana

sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak dimana wajib pajak yang mempunyai sikap positif terhadap ketidakpatuhan pajak maka niat untuk melakukan penggelapan pajaknya semakin tinggi. Adanya dampak dari kondisi situasional yang dihadapi wajib pajak yaitu tekanan ekonomi dan regulasi pemerintah berdampak terhadap sikap seseorang.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan kaitannya terhadap *Theory of Planned Behaviour*. Dimana sikap skeptis yang timbul dari wajib pajak merupakan sebuah respon negatif dari banyaknya kasus penggelapan pajak dan tidak adanya transparansi alokasi penghasilan pajak daerah.

Sehingga adanya sikap skeptis tersebut mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang harus dilaksanakan oleh para pelaku UMKM restoran di kota Binjai. Hal ini dikaitkan dengan pola pikir pelaku UMKM yang cenderung ragu dengan kebijakan perpajakan yang ada sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif dan signifikan dari inovasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai. Dengan adanya inovasi perpajakan yang terus diupayakan dapat meningkatkan partisipasi para pelaku UMKM restoran di kota Binjai. Adanya inovasi perpajakan juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM restoran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
2. Sikap skeptis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai. Adanya sikap skeptis yang melekat pada para pelaku UMKM restoran di kota Binjai berdampak pada tingkat kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak yang harus mereka jalankan.
3. Adanya pengaruh signifikan antara inovasi perpajakan dan sikap skeptis secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai. Nilai koefisien sebesar 0,538 atau sebesar 53,8% yang berarti bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai dapat dijelaskan oleh variabel inovasi

perpajakan dan sikap skeptis. Sedangkan sisanya sebesar 46,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

5.1 Saran

Penulis mengakui bahwa penelitian ini secara isi memiliki banyak kekurangan terkait dengan proses pengumpulan data, pengolahan data dan pembahasan yang kurang mendalam dalam beberapa analisis yang dilakukan. Pada masa yang akan datang penulis mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menyajikan penelitian yang lebih berkualitas lagi. Dengan ini penulis memberikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan:
 - a. Agar dapat menambah variabel-variabel independen baru pada penelitianterkait terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di kota Binjai.
 - b. Menggunakan teknik pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk yang lebih berkualitas.
 - c. Dapat menentukan sample penelitian yang lebih tepat dan menggunakan sample yang lebih banyak dari penelitian ini.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak atau Pengurus Pajak Wilayah Kota Binjai. Hendaknya pihak-pihak terkait tersebut dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya terutama mengenai faktor inovasi perpajakan dan sikap skeptis, karena faktor tersebut terbukti sangat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Di harapkan agar pihak terkait turut melaksanakan penyuluhan kepada para wajib pajak tanpa

terkecuali, sehingga dapat menambah meningkatkan kesadaran wajib pajak.

- 3 Bagi pembaca diharapkan agar tertarik untuk mengembangkan penelitian ini sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. *EJurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 969–994.
- Arya Yogatama. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang andisari). *Jurnal*. Semarang.
- Asmarany, T., Putri, T. E., & Ichi. (2020). Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pp 23 Tahun 2018 Tentang Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertent. 88349033(83).
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Deva, S. A. (n.d.). Pengaruh Penerapan Efiling dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). 102– 112.
- Dodi R Setiawan,S.IP., M. S., & Drs. Achmad Barlian, M. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016. <https://stiami.ac.id/index.php/download/get/317/penelitian-dodi-r-setiawan>
- Faizin, Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Fajar Mukti. 2016. *UMKM Indonesia Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Frianti Wiajaya. 2018. Pengaruh Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan dan Hak Legal Terhadap Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) Survey Terhadap UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal* vol. 2 2018.

- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Hidayat, & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory Of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal AKuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82– 93.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Indonesia), L. J. S. (CNBC. (2020). Penerimaan Pajak 2019 Kurang Rp 245 T. <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020108124140-4-128523/duh-jauh-dari-target-penerimaan-pajak-2019-kurang-rp-245-t>
- Ingrid Grace Manuputty dan Swanto Sirait. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Jurnal vol. 1 No 2* (2016).
- Kurniawan, Kumadji, S., & Yaningwati, F. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi). *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–8.
- Laksmi Puspita Yanti, P., & Ery Setiawan, P. (2020). Pengaruh Penerapan E- Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1900. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p01>
- Lasmanawati. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.

NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.

Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.

Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

Pandu Harsinto dan Sarsiti. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Pengenaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali. *Jurnal* vol. 15 No 4 Oktober 2017.

Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

Rangkyu, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.

Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.

RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.

Rusiadi, Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.